

**RANCANGAN AKHIR
(RANHIR) 2024
KECAMATAN ARANGKAYU
KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Alamat : Jalan Mulawarman RT.2 Desa Sebuntal
Kecamatan Marangkayu 75385

KATA PENGANTAR

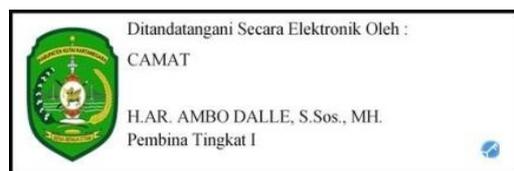
Penyusunan Rancangan Akhir (RANHIR) Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kecamatan, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Marangkayu dalam membina, melayani, dan pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA Kecamatan Marangkayu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Marangkayu. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir (RANHIR) Kecamatan Marangkayu masih banyak kekurangannya oleh karena ini kami mohon masukan dari stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara manupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan yang strategis pada Kecamatan Marangkayu dimasa yang akan datang.

Di Tetapkan : Di Marangkayu

Tanggal : 16 Agustus 2023



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu Dan Capaian Renstra-PD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program danKegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
4.1 Program Dan Kegiatan.....	33
BAB V PENUTUP	37
Lampiran :	
Matrik Pemetaan Perangkat Daerah Kecamatan MARANGKAYU Berdasarkan Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip **Good Governance** yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dan dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2),

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi "KUKAR IDAMAN" yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2022-2026 serta keberhasilan (*success story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Awal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 - 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Marangkayu selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD dan Renstra Kecamatan.

2 Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat

Marangkayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marangkayu Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu "BERGERAK SEARAH MENUJU KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA" dengan misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani serta misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Marangkayu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra- PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah Belanja Langsung Urus Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan MARANGKAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 20162021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2020)			Target program / kegiatan (Renja- PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD tahun (2020)	Realisasi Renja-PD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran								
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	480	384	100	100	100%	240	480	100%
01.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur	60	40	100	100	100%	0	30	60%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	17	100	100	0%	17	102	100%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	30	5	25	25	100%	30	30	100%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah/Jenis	132	22	22	22	100%	40	132	100%

1	2	3	s/d 2021	2020	6	7	8	9	10	11
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi	8400	1400	1400	1400	100%	1400	3300	100%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah staf pendukung	120	100	100	100	58%	100	120	87%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	54188	24094	10047	10047	100%	10047	44188	82%
01.012	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Kegiatan	215	90	80	80	100%	102	272	127%
	Penataan Arsip Perangkat	Jumlah berkas	1500		1000	1000	100%	500	1500	100%
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur kondisi baik								
02.001	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah/item	53	44	6	6	100%		50	94%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah/item	23	19	19	19	100%	19	19	100%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	5	3	1	2	200%	2	7	140%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	85	17	17	100%	17	100	100%
02.031	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah/item	37	24	30	30	100%	0	37	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000.03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	21	0	21	21	100%		21	100%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	1	1	100%	1	2	100%
06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	12	0	10	10	100%	2	12	100%
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur								
	Fasilitasi Tim BEKIAS		1	1	0	0	0%	0	1	100%
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	3175	1905	545	485	89%		2390	75%
	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Jumlah personil	1116	1116	0	0	0%	0	1116	100%
46.004	Fasilitasi Pelayanan Linmas	Jumlah personil	744		372	372	100%	372	744	100%
46.003	Fasilitasi/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah lembaga	15	9	3	3	100%		12	80%
46.002	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	jumlah peserta	300	180	60	0	0%	0	180	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.001	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG	jumlah peserta	500	300	100	100	100%	100	500	100%
46.005	Fasilitasi Pelaksanaan HUT RI	Jumlah peserta	500	300	10	10	100%	100	410	82%
0103.52	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum Kecamatan	cakupan Sarana prasarana kondisi baik	169	156	4	4	100%	0	160	95%
52.002	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah Unit	29	16	4	4	100%		20	69%
0103.54	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Jalan jembatan Kecamatan dalam kondisi Baik	14521	6188	4936	5923	120%		12111	83%
	Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	1926	1926			0%		1926	100%
	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	jumlah unit	1				0%		1	100%
54.001	Pembangunan Jalan Kecamatan	panjang jalan	267		267	267	100%		267	100%
	Pembangunan Turap	Jumlah unit	5		5	5	100%		5	100%
54.003	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	12317	4259	4653	5640	121%		9899	80%
54.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan	Jumlah unit	1		9	9	100%		9	900%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	Jumlah unit	4	2	2	2	100%		4	100%
0103.55	Program Pembangunan /Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong- gorong Kecamatan	cakupan saluran gorong-gorong kecamatan kondisi baik	773	323	200	200	100%		523	68%
55.001	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang saluran drainase yang dibangun	773	323	200	200	100%		523	68%
	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan		10	8	0	0	0%		8	80%
	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	jumlah unit	10	8	0	0	0%		8	80%
0103.57	Program Pembangunan Turap Kecamatan	pembangunan turap kecamatan kondisi baik	1886	867	0	0	0%		867	46%
	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	253	0	0	0%		253	27%
57.001	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	614	0	0	0%		614	65%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah :

- a. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marangkayu selama kurun waktu tahun 2020 - 2021 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Marangkayu, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam table T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Cc								
	Jumlah Dokumen			0	9	9	9	0		9	9	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			10	2	2	2	10		2	2	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			10	10	10	10	10		10	10	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah				5	5	5			5	5	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	10	10	10	10		10	10	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			11	11	11	11	11		11	11	
	Jumlah Kegiatan			4	4	4	4	4		4	4	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Desa yang difasilitasi			11	11	11	11	11		11	11	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD.

Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Pelayanan di Kecamatan Marangkayu pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kecamatan Marangkayu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Marangkayu masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi linmas
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan
3. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan
4. Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan
5. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan
6. Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
2. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatkan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

bupati

5. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan layanan umum
 6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan
 7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
- Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
3. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan

di atas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Potensi dibidang perikanan yaitu adanya beberapa desa di sekitaran pesisir yang merupakan lokasi usaha perikanan baik kegiatan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan
2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di desa Santan Ulu dan Karet di beberapa Desa
3. Banyak pelaku UKM di 11 (sebelas) desa yang semakin bertambah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran dengan tabel sebagai berikut :

		Dan Tunjangan				Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	75.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	80.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	45.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi		225.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	107.400.000
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD				-				40.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi		84.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	10.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan		40.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	57.400.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian yang di adakan		50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian yang di adakan	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Akuntansi SKPD		613.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Akuntansi SKPD	613.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Jumlah Komponen Listrik		18.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Komponen Listrik	18.000.000

Kantor				Bangunan Kantor					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	50.000.000		
Penyediaan Peralatan rumah tangga		Jumlah Peralata rumah tangga	50.000.000	Penyediaan Peralatan rumah tangga		Jumlah Peralata rumah tangga	10.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	125.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Di Sediakan	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Di Sediakan	50.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan	300.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola	50.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	410.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	410.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	180.000.000		
Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel	80.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel	80.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Mesin Dan peralatan Lainnya	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Mesin Dan peralatan Lainnya	100.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan jasa tenaga pendukung	763.234.996	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Penyediaan jasa tenaga	723.234.996		

		non PNS			Daerah		pendukung non PNS			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat		2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat		2.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		309.996.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		269.996.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		450.738.996	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		450.738.996
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		210.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		58.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan		30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan		58.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang di pelihara		180.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang di pelihara		-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		8.612.839.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		5.215.990.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan		8.612.839.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan		5.215.990.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		340.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		315.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum		35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Partisipasi Peserta yang		35.000.000

	Pembangunan di Desa		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Pembangunan di Desa		mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan		305.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan		280.000.000	
					15.775.577.196						15.417.737.696

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Marangkayu sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misi kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Marangkayu dalam mencapai tujuan

trategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mrangkayu
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah kecamatan

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

1	2	3	4
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu tahun 2023 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARANGKAYU
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	6,481,780,443.00	6,481,780,443.00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62 dokumen	62 dokumen	210,000,000.00	210,000,000.00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 laporan	2 laporan	4,341,102,700.00	4,341,102,700.00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	29 orang	29 orang	4,341,102,700.00	4,341,102,700.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	5 unit	5 unit	168,800,000.00	168,800,000.00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 Laporan	12 laporan	128,000,000.00	128,000,000.00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40,800,000.00	40,800,000.00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	Jenis	518,642,747.00	518,642,747.00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	18,000,000.00	18,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1210 porsi	1210 porsi	75,000,000.00	75,000,000.00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20.047 Lembar	20.047 Lembar	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 kali	150 kali	275,642,747.00	275,642,747.00	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 jenis	500 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	763,234,996.00	763,234,996.00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	309,996,000.00	309,996,000.00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	450,738,996.00	450,738,996.00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	405,189,042.00	405,189,042.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	10 Unit	205,197,120.00	205,197,120.00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	199,991,922.00	199,991,922.00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	390,587,000.00	390,587,000.00	
			Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	8 kali	8 kali	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musrenbang	100 orang	100 orang	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	8,390,000.000.00	9,016,600.000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11 Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	
			JUMLAH				14,043.060,290.00	16,653,843.025	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marangkayu.

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2023. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Marangkayu.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Tetapkan : Di Marangkayu

Tanggal : 16 Agustus 2023

